

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. Reki Radeswandri (2021) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana (Kb) Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”. Menjelaskan secara umum tujuan dibentuknya Kampung KB ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera. Sedangkan secara khusus, Kampung KB ini dibentuk selain untuk meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat untuk menyelenggarakan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait, juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan selama proses penelitian berlangsung, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa program Kampung KB ini jika dijalankan dengan baik maka akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan bisa juga dijadikan cara untuk merubah kehidupan masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial, keagamaan dan juga yang lainnya. Namun yang penulis temui di lapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Program Kampung KB di Desa Pulau Aro masih belum

berjalan secara maksimal, hal ini bisa dilihat dari segi respon atau tanggapan masyarakat terhadap program tersebut. Pengurus Kampung KB nya masih ada yang belum paham apa itu Kampung KB, sedangkan dalam menjalankan suatu program di masyarakat harusnya terlebih dahulu pengurusnya yang mengetahui maksud dari program tersebut. Peranan pemerintah dan juga elemen-elemen masyarakat menjadi faktor pendorong yang sangat penting bagi berlangsungnya program Kampung KB di Desa Pulau Aro. Pemerintah melalui dukungannya secara formil dan juga elemen-elemen masyarakat yang secara praksis bahu membahu demi keberlangsungan program Kampung KB ini. Sementara itu faktor penghambat pelaksanaan program kampung KB di Desa Pulau Aro yakni yang pertama, kesadaran masyarakat yang rendah sehingga menyebabkan belum terlaksananya program-program yang telah dibuat oleh pemerintah di Desa Pulau Aro tersebut. Kedua, Kurangnya tenaga penyuluh yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sehingga tidak mampu mengcover semua kegiatan di dalam Program Kampung KB.

2. Febiy Wolandari (2021) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, dengan penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Kampung KB Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di Desa Jingah Bujur Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara”. Menjelaskan secara umum bahwa Program Kampung KB Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di Desa Jingah Bujur Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah efektif. Pada ruang lingkup

variabel pemahaman program dapat dilihat dari indikator: Pertama, sudah sesuai dengan yang diharapkan karena pemahaman program didapat dari penyuluhan dan sosialisasi. Kedua, sudah sesuai dengan yang diharapkan karena pengetahuan kelompok didapat dari penyuluhan dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh pihak BKKBN, DPPKB, PLKB dan dinas-dinas terkait lainnya. Pada ruang lingkup variabel ketepatan sasaran dapat dilihat pada indikator: Pertama, ketepatan sasaran program sudah sesuai, karena kriteria pembentukan Kampung KB yang ditentukan oleh BKKBN ditemukan beberapa di antaranya di Desa Jingah Bujur. Kedua, keberhasilan efektivitas belum sesuai karena lebih banyak kelompok kegiatan yang belum rutin berjalan. Pada ruang lingkup variabel ketepatan waktu dapat dilihat pada indikator: Pertama, ketepatan waktu belum sesuai karena kegiatan dilakukan tidak menentu dan tidak tepat waktu. Kedua, kesatuan jadwal yang ditentukan tidak sesuai karena sosialisasi dilakukan saat anggaran dananya sudah keluar, sementara kegiatan dilakukan tidak menentu. Pada ruang lingkup variabel pencapaian tujuan dapat dilihat pada indikator: Pertama, pencapaian tujuan belum sesuai karena masih rendahnya kesadaran masyarakat akan mengikuti program yang ada di Kampung KB. Beberapa tujuan khusus Kampung KB di Desa Jingah Bujur juga masih belum tercapai. Kedua, kejelasan kelompok sasaran sudah sesuai dan terbagi dua, yaitu sasaran langsung dan sasaran tidak langsung. Pada ruang lingkup variabel perubahan nyata dapat dilihat pada indikator: Pertama, pencapaian tujuan sudah sesuai karena banyak perubahan kualitas hidup yang didapat

masyarakat setelah adanya Program Kampung KB. Kedua, sudah memberikan hasil yang nyata karena program Kampung KB sendiri banyak memberi pengetahuan dan pemahaman, juga dari bantuan-bantuan yang diberikan banyak memberi banyak manfaat untuk masyarakat.

Keunikan penelitian saya adalah pada teori utama yang mana penelitian saya menggunakan teori efektivitas menurut Edy Sutrisno (dalam Amrizal 2018:43) yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata yang akan mengukur apakah program ini sudah efektif atau belum dan dapat menjawab fenomena masalah yang ada dan teori ini sesuai dengan penelitian saya. Fenomena masalah yang dikaji berbeda dengan penelitian terdahulu yang membahas tentang program Kampung KB dalam mewujudkan keluarga sejahtera dan tentang program KB dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sedangkan penelitian saya membahas tentang partisipasi masyarakat dalam program KB dalam penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Desa Pasungkan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Konsep Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari bahasa inggris, yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena mungkin hasil dicapai dengan penghamburan material, juga berupa pikiran,

tenaga, waktu, maupun benda lainnya. Kata efektif sering diikuti dengan kata efisiensi, di mana kedua kata tersebut sangat berhubungan dengan produktivitas dari suatu tindakan atau hasil yang diinginkan.

Menurut Mc Gill (dalam Karsono 2024:35) mengatakan “Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, efektivitas menunjukkan sejauh mana tujuan tersebut dapat diwujudkan. Bagi banyak organisasi, efektivitas berarti upaya untuk memaksimalkan tujuan serta hasil yang ingin dicapai”.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi. Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Sughandi (dalam Annas 2017:75) Efektivitas merupakan upaya memanfaatkan berbagai sumber daya serta sarana dan prasarana yang telah direncanakan sebelumnya dalam jumlah tertentu, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Efektivitas adalah suatu ukuran tentang bagaimana suatu target atau sasaran yang telah ditentukan tercapai yang mengacu pada hasil akhir. Hasil akhir adalah tujuan utama, semakin mencapai target yang ditentukan maka efektivitasnya semakin baik.

Efektivitas dapat didefinisikan dengan empat hal menggambarkan tentang efektivitas, yaitu;

- 1) Mengerjakan hal-hal yang benar, di mana sesuai dengan yang seharusnya diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya.
- 2) Mencapai tingkat di atas pesaing di mana mampu menjadi yang terbaik dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik.

- 3) Membawa hasil, di mana apa yang telah dikerjakan mampu memberi hasil yang bermanfaat.
- 4) Menangani tantangan masa depan.

Menurut Sutarto (dalam Amiruddin 2023:23) Efektivitas kerja merupakan kondisi ketika usaha fisik dan pemikiran yang dilakukan seseorang dalam bekerja dapat menghasilkan pencapaian sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah suatu ukuran tentang bagaimana suatu target atau sasaran yang telah ditentukan tercapai yang mengacu pada hasil akhir. Hasil akhir adalah tujuan utama. Semakin mencapai target yang ditentukan maka efektivitasnya semakin baik.

Menurut Dunn (dalam Ismaya 2022:25) menyatakan bahwa efektivitas berkaitan dengan sejauh mana suatu alternatif mampu menghasilkan dampak yang diharapkan atau mencapai tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan suatu tindakan.

b. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel seperti yang dijelaskan Sutrisno (dalam Amrizal 2018:43) mengidentifikasi beberapa aspek kunci dalam mengukur efektivitas suatu program dalam organisasi:

- 1) Pemahaman program: Mengukur seberapa jauh penerima manfaat memahami program melalui sosialisasi, pengenalan, dan informasi yang diberikan. Pemahaman ini penting agar program berjalan sesuai dengan tujuan.
- 2) Ketepatan sasaran: Menentukan sejauh mana program mencapai target yang diinginkan, termasuk keakuratan penerima manfaat dan kesesuaian isi program dengan kebutuhan.

- 3) Ketepatan waktu: Mencakup pengaturan waktu yang sesuai dengan rencana pelaksanaan program, sehingga dapat memaksimalkan pencapaian hasil.
- 4) Tercapainya tujuan: Ukuran keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan, baik melalui pelatihan maupun kegiatan lain dalam program.
- 5) Perubahan nyata: Efek atau dampak yang dihasilkan oleh kegiatan program dalam memberikan perubahan nyata bagi masyarakat.

Sedangkan menurut Duncan (dalam Richard M. Steers, 2020:53) mengungkapkan bahwa ukuran efektivitas sebagai berikut:

1) Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya untuk mencapai suatu tujuan yang harus dianggap sebagai suatu proses. Oleh karena itu, pencapaian tujuan akhir semakin terjamin.

2) Integritas

Integritas adalah ukuran tingkat kemampuan suatu organisasi untuk melakukan sosialisasi dan perkembangan consensus dan komunikasi dengan berbagai organisasi lainnya. Integritas merupakan proses sosialisasi.

3) Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Sedangkan menurut Sedarmayanti (dalam Hertati 2019:24–25) Ukuran efektivitas mencakup beberapa unsur, yaitu *input*, proses, hasil (*output*), dan produktivitas.

- 1) *Input* diartikan sebagai seluruh unsur yang masuk ke dalam sistem sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan berpengaruh terhadap pencapaian hasil. *Input* dapat berupa ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja instansi, seperti ruang server serta bahan atau data yang diperlukan untuk diolah menjadi informasi.
- 2) Proses produksi berkaitan dengan rangkaian kegiatan yang terjadi di dalam sistem, termasuk komunikasi yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan upaya menentukan sasaran yang tepat serta memilih cara terbaik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

- 3) Hasil (*output*) merupakan keluaran yang dihasilkan dari proses pengolahan dalam sistem. Hasil ini dapat dilihat melalui perbandingan antara input dan *output*, baik dalam bentuk produk yang dihasilkan maupun layanan berupa pelayanan yang optimal dari instansi terkait.
- 4) Produktivitas merupakan ukuran efisiensi pemanfaatan sumber daya dalam suatu organisasi, yang umumnya dinyatakan melalui perbandingan antara jumlah *output* yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan.

Menurut S. P. Siagian (dalam Amrizal 2018:51) Kriteria atau ukuran untuk menilai tercapai atau tidaknya efektivitas tujuan organisasi menurut S.P. Siagian meliputi beberapa aspek, yaitu:

- 1) Kejelasan tujuan, menjadi hal utama agar pegawai dalam melaksanakan tugas memiliki arah yang jelas sehingga sasaran organisasi dapat tercapai.
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, yaitu penentuan langkah atau cara yang akan ditempuh dalam mencapai sasaran agar para pelaksana tidak mengalami kesalahan arah dalam menjalankan tugas organisasi.
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang tepat sangat penting karena kebijakan berfungsi sebagai penghubung antara tujuan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan kegiatan operasional.
- 4) Perencanaan yang matang juga diperlukan sebagai bentuk penetapan keputusan sejak awal mengenai kegiatan yang akan dilakukan organisasi di masa mendatang.
- 5) Penyusunan program yang tepat, di mana rencana yang telah dibuat perlu dijabarkan ke dalam program-program kerja yang jelas agar pelaksana memiliki pedoman dalam bertindak.
- 6) Ketersediaan sarana dan prasarana kerja turut menentukan efektivitas organisasi karena mendukung kemampuan organisasi dalam bekerja secara produktif.
- 7) Pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien menjadi penentu tercapainya tujuan, sebab program yang baik tidak akan menghasilkan capaian optimal tanpa pelaksanaan yang tepat.
- 8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana, mengingat keterbatasan manusia dalam menjalankan tugas.

Menurut Gibson (dalam Mutiarin 2021:98) mengemukakan bahwa efektivitas suatu kegiatan dapat diukur melalui tiga indikator yang dibedakan berdasarkan rentang waktu.

- 1) Efektivitas jangka pendek, berkaitan dengan capaian langsung dari pelaksanaan kegiatan, yang mencakup tingkat produksi, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, serta tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pihak terkait.
- 2) Efektivitas jangka menengah berhubungan dengan kemampuan organisasi untuk beradaptasi terhadap perubahan serta mengembangkan kapasitas dan kualitasnya dalam menjalankan kegiatan.
- 3) efektivitas jangka panjang menekankan pada keberlanjutan kegiatan atau organisasi, yaitu kemampuan untuk mempertahankan eksistensi dan kinerjanya dalam jangka waktu yang panjang.

Menurut Campbell (dalam Fernandes 2025:20-21) penentuan efektif atau tidaknya suatu program yang dijalankan, maka perlunya ukuran-ukuran efektivitas. Terdapat 5 indikator secara umum, penilaian efektivitas, yakni:

- 1) Tingkat *input* dan *output*, yaitu efektivitas dapat dilihat melalui perbandingan antara masukan dan keluaran yang dihasilkan. Suatu program dinilai efektif dan efisien apabila keluaran yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan masukan yang digunakan, sedangkan apabila sebaliknya maka program tersebut dinilai kurang efisien dan tidak efektif.
- 2) Keberhasilan program, yang dapat dinilai dari proses dan mekanisme pelaksanaan kegiatan di lapangan, termasuk kemampuan operasional organisasi dalam menjalankan program kerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 3) Tingkat kepuasan terhadap program, yang berkaitan dengan sejauh mana program mampu memenuhi kebutuhan pengguna. Kepuasan pengguna dipengaruhi oleh kualitas produk dan layanan yang diberikan, di mana semakin baik kualitas tersebut maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan, sehingga memberikan manfaat bagi lembaga pelaksana.
- 4) Keberhasilan sasaran, yaitu efektivitas yang ditinjau dari tingkat pencapaian tujuan organisasi dengan menitikberatkan pada hasil atau *output* yang diperoleh melalui pelaksanaan kebijakan maupun prosedur yang telah ditetapkan.
- 5) Pencapaian tujuan secara menyeluruh, yang menggambarkan sejauh mana organisasi mampu melaksanakan tugasnya secara keseluruhan. Indikator ini merupakan penilaian umum yang didasarkan pada berbagai kriteria untuk menghasilkan gambaran tingkat efektivitas organisasi secara komprehensif.

c. Faktor yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas

Menurut Steers (dalam Ananda 2025:24) mengemukakan bahwa efektivitas kerja dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu :

1) Karakteristik organisasi.

Faktor ini berkaitan dengan bagaimana struktur organisasi dibentuk dan dijalankan. Struktur tersebut menentukan jalur kerja yang harus ditempuh karyawan, serta mengatur pola interaksi dan perilaku kerja yang berorientasi pada tugas.

2) Karakteristik lingkungan.

Lingkungan kerja secara keseluruhan termasuk fasilitas, peralatan, hubungan antarpegawai, serta kondisi kerja ikut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas.

3) Karakteristik pekerja.

Anggota organisasi menjadi faktor yang sangat menentukan karena perilaku merekalah yang dapat mempercepat atau menghambat tercapainya tujuan. Pekerja merupakan sumber daya yang langsung terlibat dalam pengelolaan seluruh sumber daya organisasi, sehingga sikap dan tindakan mereka sangat berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi.

4) Karakteristik kebijakan dan praktik manajemen.

Praktik manajemen mencakup strategi, mekanisme kerja, dan upaya organisasi dalam mengelola seluruh unsur yang ada. Dalam penyusunannya, manajemen perlu mempertimbangkan perbedaan individu, bukan hanya fokus pada strategi, pemanfaatan sumber daya, atau penciptaan lingkungan kerja yang mendukung. Proses komunikasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan, kemampuan beradaptasi dengan perubahan, serta inovasi organisasi juga menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas kerja.

d. Kriteria Efektivitas

Mengukur kriteria ada studi dari perspektif yang berbeda-beda. Tergantung siapa yang menilai dan siapa yang menafsirkan. Pengukuran kriteria efektivitas individu ada tiga pendekatan yang diperlukan menurut Martani (dalam Sari, 2021:3-4) adalah sebagai berikut:

1) Pendekatan sumber (*resource approach*)

Menilai efektivitas berdasarkan input, dengan menitikberatkan pada kemampuan organisasi dalam memperoleh berbagai sumber daya baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhannya.

2) Pendekatan proses (*process approach*)

Melihat sejauh mana program berjalan efektif melalui penilaian terhadap keseluruhan aktivitas dan mekanisme internal organisasi.

3) Pendekatan sasaran (*goals approach*)

Berfokus pada output dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai hasil sesuai rencana. Dalam konsep efektivitas, pencapaian tujuan secara optimal menjadi unsur utama, karena tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang telah disepakati.

2. Kampung KB

a. Pengertian Kampung KB

Kampung KB adalah salah satu wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, di mana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. (Pedoman Pelaksanaan Kampung KB, 2017:13).

Menurut Siregar (2024:43) Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) adalah wilayah setingkat desa yang menjadi tempat berlangsungnya kegiatan terpadu untuk pemberdayaan serta penguatan ketahanan keluarga dalam berbagai aspek, dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga, dan masyarakat.

Sedangkan menurut Setyorini (2024:29) definisi Keluarga Berencana merupakan kemampuan seseorang atau pasangan untuk merencanakan dan mewujudkan jumlah anak yang mereka inginkan, termasuk mengatur jarak serta waktu kelahiran, yang dilakukan melalui penggunaan metode kontrasepsi maupun penanganan masalah infertilitas.

b. Persyaratan Pembentukan Kampung KB

Proses pembentukan kampung KB dalam suatu wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi Kampung KB perlu memperhatikan persyaratan wajib yang harus dipenuhi, yaitu:

1) Dukungan dan Komitmen Pemerintah Daerah

Komitmen dan peranan aktif seluruh instansi/unit kerja, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan dalam memberikan dukungan terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kampung KB dan bersedia memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas instansi masing-masing untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2) Ketersediaan Data dan Informasi Kependudukan yang Akurat

Data kependudukan yang akurat adalah data yang bersumber dari Hasil Pendapatan Keluarga, Data Potensi Desa dan Data Catatan Sipil yang akurat sehingga dapat digunakan sebagai dasar penetapan prioritas, sasaran dan program yang akan dilaksanakan di suatu wilayah Kampung KB secara berkesinambungan.

Dukungan lintas sektor tingkat kabupaten/kota dalam penggarapan Kampung KB, didasari analisis data hasil Pendapatan Keluarga tahun 2016, data kependudukan dan catatan sipil serta data potensi desa. Data tersebut dibahas dan dibedah dalam forum sarasehan data hasil pendapatan di tingkat kampung. Satu-persatu

persoalan dibahas dan diselesaikan oleh dinas/instansi yang berwenang.

Misal ditemukan data keluarga yang belum mempunyai surat nikah, maka segera dilakukan langkah koordinasi oleh PLKB/PKB kepada Kepala Desa, agar diundang Kementerian Agama (Kemenag)/Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memberikan surat kepada keluarga-keluarga di Kampung KB yang belum mempunyai surat nikah. Contoh lain, misal ditemukan data dalam keluarga yang mempunyai anak dan bayi tapi belum diimunisasi, maka segera lakukan langkah dikoordinasikan oleh PLKB/PKB kepada Kepala Desa agar Kepala Puskesmas atau Bidan Desa untuk melakukan pelayanan imunisasi di Kampung KB.

3) Partisipasi Masyarakat

Dukungan partisipasi aktif dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan yang akan dilakukan di Kampung KB secara berkesinambungan merupakan prasyarat.

Pembentukan Kampung KB guna meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat yang ada di wilayahnya. Selain itu keterlibatan pihak swasta dalam penggarapan program pembangunan di Kampung KB sangat penting sebagai bentuk gotong-royong dari semua pihak.

c. Tujuan Kampung KB

Menurut BKKBN terdapat 2 (dua) tujuan pada program Kampung KB, yaitu:

1. Tujuan umum:

Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

2. Tujuan khusus:

- a) Meningkatkan peran pemerintah, lembaga non-pemerintah dan swasta untuk kependudukan;
- b) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan;
- c) Meningkatkan peserta KB aktif modern;
- d) Meningkatkan Ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) serta Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja;
- e) Meningkatkan pemberdayaan keluarga (kelompok UPPKS);
- f) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,
- g) Menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- h) Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung;
- i) Meningkatkan lingkungan kampung yang bersih dan sehat;

- j) Meningkatkan kualitas sekolah penduduk usia sekolah;
- k) Meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air pada masyarakat;

3. Sasaran Kampung KB

- a) Sasaran Langsung
 - 1) Keluarga
 - 2) Pasangan usia subur
 - 3) Masyarakat
 - 4) Balita, remaja, lansia
- b) Sasaran tidak langsung
 - 1) Tokoh masyarakat
 - 2) Organisasi masyarakat
 - 3) Petugas lapangan dan *provider*
- c) Kriteria kampung KB

Kriteria Kampung KB menentukan wilayah yang akan dijadikan lokasi Kampung KB, ada 3 (tiga) kriteria yang dipakai, yakni kriteria utama, kriteria wilayah dan kriteria khusus, yaitu:

- 1) Kriteria Utama
 - (a). Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 (miskin) di atas rata-rata Pra Sejahtera dan KS 1 tingkat desa/kelurahan di mana kampung tersebut berada.

- (b). Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/kelurahan di mana kampung tersebut berlokasi.
- 2) Kriteria Wilayah dalam pembentukan Kampung KB mencakup 10 kategori wilayah (dipilih salah satu), yaitu:
- (a). Kumuh;
 - (b). Pesisir atau Nelayan;
 - (c). Daerah Aliran Sungai (DAS);
 - (d). Bantaran Kereta Api;
 - (e). Kawasan Miskin (termasuk Miskin Perkotaan);
 - (f). Terpencil;
 - (g). Perbatasan;
 - (h). Kawasan Industri;
 - (i). Kawasan Wisata;
 - (j). Padat Penduduk;

a. Jenis-jenis Kontrasepsi KB

Terdapat beberapa jenis kontrasepsi yang disarankan oleh pemerintah dalam pelaksanaan Program KB di Indonesia, yakni:

1. Kondom adalah selubung tipis dari karet, vinil, atau produk alamiah dapat berwarna maupun tidak berwarna, biasanya ditambahkan spermisida untuk perlindungan tambahan, serta digunakan untuk menutupi penis sesaat sebelum berhubungan. Mekanisme kerja kondom adalah dengan cara menghalangi masuknya *spermatozoa* kedalam *traktus genitalia interna* wanita.

Efektivitas kondom sendiri tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 3-4 kehamilan per 100 wanita selama tahun pertama.

2. Pil KB biasanya mengandung Estrogen dan Progesteron. Cara kerja pil KB adalah dengan cara menggantikan produksi normal Estrogen dan Progesteron menekan hormon yang dihasilkan otak sehingga ovulasi dapat dicegah. Efektivitas metode ini secara teoritis mencapai 99% atau 0,1-5 kehamilan per 100 wanita pada pemakaian di tahun pertama bila digunakan dengan tepat. Tetapi dalam praktek ternyata angka kegagalan pil masih cukup tinggi yaitu 0,7-7%.
3. Kontrasepsi suntik yang biasanya tersedia adalah *Depo-provera* yang hanya mengandung Progestin dan diberikan tiap 1 bulan. Cara kerja kontrasepsi suntik yaitu dengan mencegah ovulasi, mengentalkan lendir serviks, dan menghambat perkembangan siklus endometrium efektivitas dari kontrasepsi suntik sangat tinggi mencapai 03 kehamilan per 100 wanita selama tahun pertama menggunakan, angka kegagalan metode ini 1 kehamilan per 100 wanita per tahun.
4. Kontrasepsi susuk/implan yang sering digunakan adalah Norplant Susuk adalah kontrasepsi sub dermal yang mengandung Levonorgestrel (LNG) sebagai bahan aktifnya. Mekanisme kerja Norplant yang pasti belum dapat dipastikan tetapi mungkin sama seperti metode lain yang hanya mengandung Progestin. Norplant memiliki efek mencegah ovulasi, mengentalkan lendir serviks,

dan menghambat perkembangan siklus endometrium. Efektivitas Norplant sangat tinggi mencapai 0,05-1 kehamilan per 10 wanita dalam 5 tahun pertama pemakaian. Angka kegagalan ini lebih rendah bila dibandingkan dengan metode *barrier*, pil KB, dan IUD.

5. Metode Operatif Wanita (MOW) adalah tindakan operasi minor untuk mengikat atau memotong kedua tuba falopii sehingga ovum dari ovarium tidak akan mencapai uterus dan tidak akan bertemu dengan spermatozon. Efektivitas MOW selama setahun pertama pemakaian, sedikit lebih rendah dibandingkan MOP.
6. AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim) atau IUD (*Intra uterine Devicex*) adalah kontrasepsi yang terbuat dari plastik halus berbentuk spiral atau berbentuk lain yang dipasang di dalam rahim dengan memakai alat khusus oleh dokter atau para medis lain yang terlatih. Mekanisme kerja AKDR belum diketahui tetapi kemungkinan AKDR menyebabkan perubahan-perubahan seperti munculnya sel sel radang yang menghancurkan blastokis atau spermatozoa meningkatkan produksi prostaglandin sehingga implantasi terhambat, serta bertambah cepatnya pergerakan ovum di tuba falopi. Efektivitas IUD mencapai 0,6-0,8 kehamilan per 100 wanita selama tahun pertama penggunaanya. Angka kegagalan IUD 1-3 kehamilan per 100 wanita per tahun.
7. Metode Operatif Pria (MOP) merupakan suatu metode kontrasepsi operatif minor yang aman, sederhana, dan sangat

efektif, memakan waktu operasi relative singkat dan tidak memerlukan anestesi umum MOP dilakukan dengan cara memotong vas deferens sehingga sperma tidak dapat mencapai air mani dan air mani yang dikeluarkan tidak mengandung sperma. Efektivitas sangat tinggi mencapai 0.1-0.15 kehamilan per 100 wanita selama tahun pertama pemakaian Angka kegagalan <1 kehamilan per 100 wanita.

b. Dasar Hukum Program Kampung KB

1. UU No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
2. UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2014. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan mempromosikan perkembangan penduduk yang seimbang, pembangunan keluarga, serta implementasi program Keluarga Berencana (KB) dan Sistem Informasi Keluarga (SIK).

Program KB dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga yang

berisi upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Kebijakan Program KB yang lahir dari Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 didasari untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas harus dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, serta meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 ini, perubahan yang ingin dicapai pemerintah melalui program ini tercantum dalam Pasal (2).

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga merupakan landasan hukum pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa pengendalian pertumbuhan penduduk dan pembangunan keluarga merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program Keluarga Berencana diposisikan sebagai instrumen strategis dalam mengatur kelahiran, jarak, dan usia ideal melahirkan guna menciptakan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Program Keluarga Berencana dilaksanakan berdasarkan prinsip sukarela, bertanggung jawab, non-diskriminatif, serta menghormati hak asasi manusia dan hak reproduksi setiap individu. Oleh karena itu, setiap pasangan usia subur memiliki hak untuk memperoleh informasi, edukasi, dan pelayanan keluarga berencana secara aman dan berkualitas, serta bebas menentukan jumlah dan jarak kelahiran anak sesuai dengan pilihan dan kondisi masing-masing. Negara berperan sebagai fasilitator yang menjamin tersedianya layanan dan sarana pendukung KB, tanpa melakukan paksaan dalam pengambilan keputusan reproduksi.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir pada penelitian ini berkaitan dengan Efektivitas Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) dalam Meningkatkan Partisipasi Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Desa Pasungkan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kebijakan Program KB yang lahir dari Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 didasari untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas harus dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, serta meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan. Melalui Balai Penyuluhan di Kecamatan Daha Utara dengan program KB untuk optimalisasi program. Untuk memfokuskan dalam proses

penelitian, peneliti menggunakan teori Efektivitas yang dikemukakan Teori Sutrisno (dalam Amrizal 2018:43), yakni;

1. Pemahaman Program

Mengukur seberapa jauh penerima manfaat memahami program melalui sosialisasi, pengenalan, dan informasi yang diberikan. Pemahaman ini penting agar program berjalan sesuai dengan tujuan. Sejah mana pihak pelaksana (penyuluh) dan masyarakat sasaran (PUS) memahami aturan, tujuan, dan prosedur program.

2. Tepat Sasaran

Menentukan sejauh mana program mencapai target yang diinginkan, termasuk keakuratan penerima manfaat dan kesesuaian isi program dengan kebutuhan. Program menjangkau objek yang benar-benar dipilih dan dituju.

3. Tepat Waktu

Mencakup pengaturan waktu yang sesuai dengan rencana pelaksanaan program, karena dapat memaksimalkan pencapaian hasil.

4. Tercapainya Tujuan

Ukuran keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan, baik melalui pelatihan maupun kegiatan lain dalam program, sebab tujuan utamanya untuk menekan angka kelahiran dan meningkatkan prevalensi MKJP.

5. Perubahan Nyata.

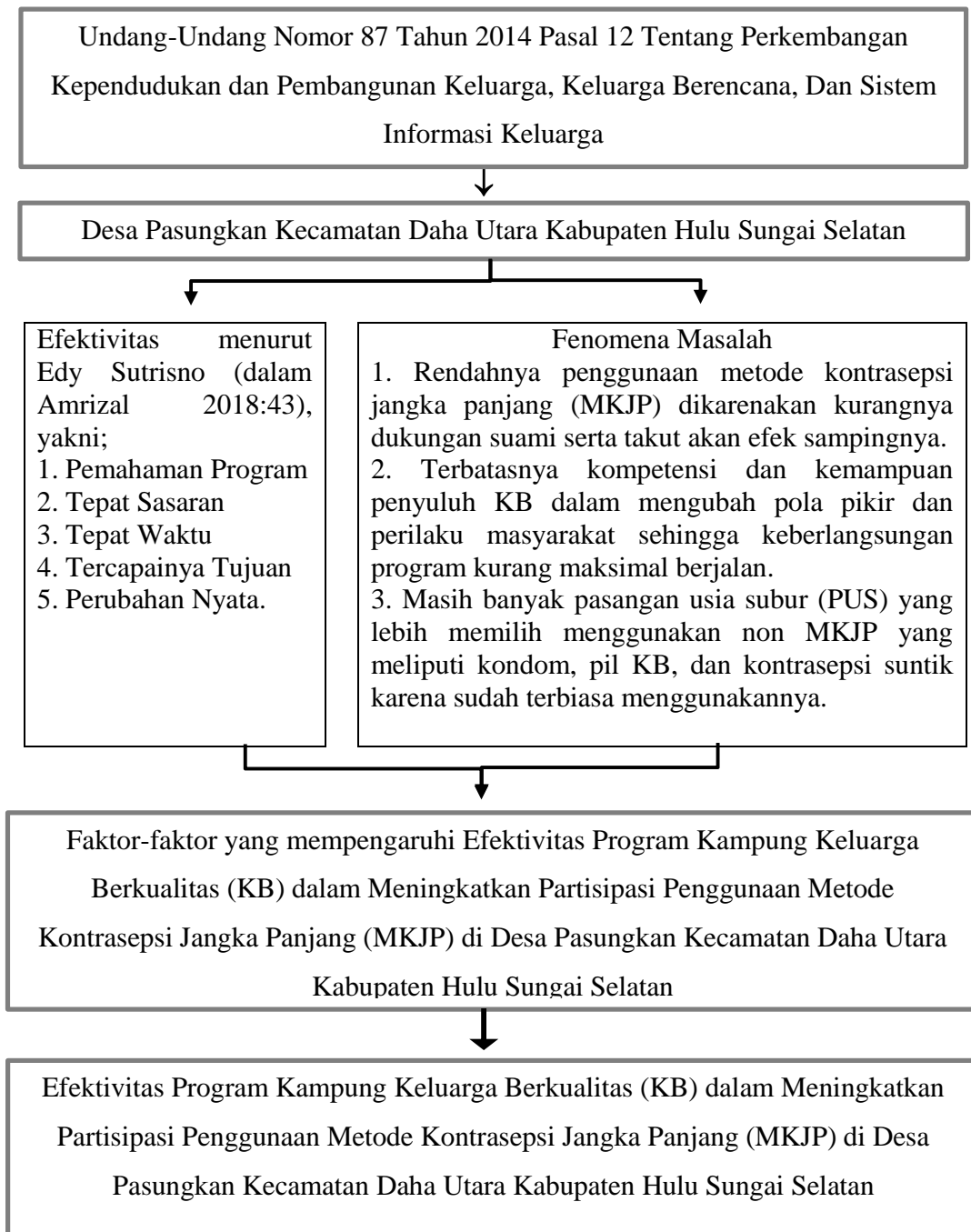
Efek atau dampak yang dihasilkan oleh kegiatan program dalam memberikan perubahan nyata bagi masyarakat.

Fenomena masalah yang ditemukan adalah Rendahnya penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dikarenakan kurangnya dukungan suami serta takut akan efek sampingnya. Terbatasnya kompetensi dan kemampuan penyuluh KB dalam mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat sehingga keberlangsungan program kurang maksimal berjalan. Masih banyak pasangan usia subur (PUS) yang lebih memilih menggunakan non MKJP yang meliputi kondom, pil KB, dan kontrasepsi suntik.

Dilaksanakan oleh Balai Penyuluhan KB Kecamatan Daha Utara, sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut sehingga dapat ditemukan mengapa minat masyarakat di Desa Pasungkan masih rendah dalam program KB MKJP dan sedikitnya jumlah akseptor yang terdata serta menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program KB dalam meningkatkan partisipasi penggunaan MKJP di Desa Pasungkan. Sehingga dapat diketahui tujuan akhir penelitian yaitu Efektivitas Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Dalam Meningkatkan Partisipasi Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Di Desa Pasungkan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sesuai uraian diatas maka dapat disimpulkan pada kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber : Dibuat Oleh Peneliti 2025